



Temuan BPK Masih Kendala

■ Gelar FGD Bersama Stakeholders



TRIBUN/PRA

FGD - Suasana Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan atau stakeholders Provinsi Kalbar di Aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (12/11).



PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji mengakui masih ditemui beberapa kendala yang dialami oleh kepala daerah saat menindaklanjuti suatu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Satu di antara temuan itu adalah jika dalam bentuk kerugian negara. Ia mencontohkan satu kasus saat dirinya masih menjadi Wali Kota Pontianak dulu.

Temuan kerugian negara menjadi kendala apalagi jika sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. "Lalu sampai pada proses pengadilan dan ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah," ungkapnya saat FGD Kalbar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (12/11).

Terkadang, jumlah kewajiban yang dikembalikan tidak sejumlah yang jadi temuan. Misalnya temuan yang sampai ke pengadilan ada Rp 26 miliar. Lalu, putusan pengadilan Rp 5,7 miliar dan pengembalian oleh tersangka sebelum perkara sebesar Rp 2,3 miliar. Jadi, hanya Rp 8 miliar saja.

Yang Rp 18 miliar itu mau diapakan? Apakah tetap jadi beban yang bersangkutan karena sudah melaksanakan hukuman atau bagaimana. Ini harus cepat diselesaikan, kalau tidak gantung-terus," terangnya.

Sutarmidji menimpali Kalbar termasuk Pemerintah Provinsi satu-satunya yang dinilai paling informatif dari luar Pulau Jawa oleh Komisi Informasi Pusat. Kalbar juga termasuk provinsi paling terbaik transparansi dalam segala hal.

"Penilaian Komisi Informasi yang menjadi poin yakni melihat Provinsi Kalbar melaksanakan bedah dan evaluasi APBD kepada masyarakat. Ini poin dalam transparansi dan akuntabel dalam tata kelola keuangan serta pemerintah daerah," imbuhnya.

Ia menegaskan kembali programnya merealisasikan percepatan pembangunan ratusan desa kategori mandiri di Kalbar. Nantinya, desa-desa mandiri harus ditopang oleh transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

"Dari 2.031 desa yang ada di Kalbar, saya target dalam waktu lima tahun akan menjadikan desa mandiri. Setiap tahunnya, akan ada 300 sampai 400 desa yang akan kita jadikan desa mandiri dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan atau stakeholders Provinsi Kalbar.

FGD bertema Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dihadiri oleh Gubernur Kal-

bar H Sutarmidji, Bupati dan Wali Kota 14 Kabupaten/kota se-Kalbar, unsur forkompinda Kalbar dan lainnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono menerangkan FGD

bertujuan berikan penjelasan kepada entitas tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. **(pra)**